

**UPAYA LOKALISASI INTERNATIONAL COMMITTEE OF
THE RED CROSS MENGHADAPI HUMANITARIAN AID
DILEMMA DI KRISIS SURIAH TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**DANDI RIADY RAMADHAN
(07041382025237)**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"Upaya Lokalisasi International Commitee of the Red Cross dalam Menghadapi Humanitarian Aid Dilemma di Krisis Suriah Tahun 2023"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

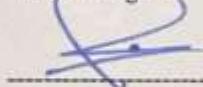
Dandi Riady Ramadhan

07041382025237

Pembimbing I

1. Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 19770512 2003121003

Tanda Tangan



Tanggal

10 / 2024
12

Pembimbing II

2. Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., MA
NIP. 199301072023211022



2 / 2024
12



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

"UPAYA LOKALISASI INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS MENGHADAPI HUMANITARIAN AID DILEMMA DI KRISIS SURIAH TAHUN 2023"

Skripsi

Oleh :

Dandi Riady Ramadhan

07041382025237

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., MA
NIP. 199301072023211022

Tanda Tangan



Penguji :

1. Abdul Halim, S.I.P., M.A.
NIP. 199310082020121020

2. Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int
NIP. 198805252023211033

Tanda Tangan



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Riady Ramadhan

NIM 07041382025237

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "UPAYA LOKALISASI INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM MENGHADAPI HUMANITARIAN AID DILEMMA DI KRISI SURIAH TAHUN 2023" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 28, Mei, 2024

Yang membuat pernyataan



Dari Dandi Riady Ramadhan

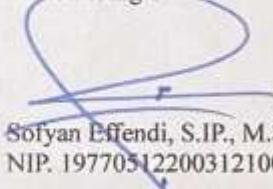
NIM 07041382025237

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Lokalisasi dari *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam menghadapi kasus-kasus *Humanitarian Aid Dilemma* di Krisis Kemanusiaan Suriah. Krisis Kemanusiaan Suriah telah berlangsung lama dan merupakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di sejarah modern. Krisis ini merupakan hasil konflik yang terjadi sejak revolusi Arab Spring pada tahun 2011 yang lalu berubah jadi konflik perang saudara di Suriah yang terus berlanjut sampai sekarang. *Humanitarian Aid Dilemma*, yang dimana para aktor-aktor kemanusiaan dibatasi gerakannya oleh pemerintahan Suriah atas dasar kekhawatiran terhadap keamanan dan kedaulatan negara sehingga para korban dari krisis ini seperti *Internal Displaced People* (IDP), tidak dapat akses kepada bantuan kemanusiaan terutama yang berada di daerah yang dinyatakan oleh pemerintahan Suriah telah ditahan oleh oposisi. Penelitian ini menggunakan teori Humanitarisme dan teori Lokalisasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Kualitatif Deskriptif untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini melalui Studi Pustaka, dimana peneliti menggunakan data dari karya literatur, seperti, Jurnal, Buku, Artikel Ilmiah, Website dan Berita resmi. Hasil dari pembahasan menunjukkan ada tujuh macam upaya yang dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yaitu, *Relationship Quality, Participation Revolution, Funding and Financing Capacity, Coordination, Visibility* dan *Policy*. Dari tujuh upaya-upaya ini, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mampu menghadapi *Humanitarian Aid Dilemma* yang terjadi di Krisis Suriah.

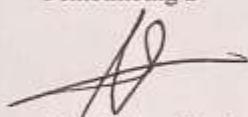
Kata Kunci: *Humanitarian Aid Dilemma, International Committee of the Red Cross, Krisis Kemanusiaan Suriah, Lokalisasi, Upaya.*

Pembimbing 1



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2



Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., MA
NIP. 19930107202321102

Palembang,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



ABSTRACT

This research aims to understand how the Localization Efforts of the International Committee of the Red Cross (ICRC) address the Humanitarian Aid Dilemma cases in the Syrian Humanitarian Crisis. The Syrian Humanitarian Crisis has been ongoing for a long time and is one of the largest humanitarian crises in modern history. This crisis is the result of a conflict that began with the Arab Spring revolution in 2011, which has since turned into a civil war in Syria that continues to this day. Humanitarian Aid Dilemma, where humanitarian actors are restricted in their movements by the Syrian government on the grounds of concerns over national security and sovereignty, resulting in victims of this crisis such as Internally Displaced People (IDP), being unable to access humanitarian aid, especially those in areas declared by the Syrian government to be held by the opposition. This research uses the theory of Humanitarianism and the theory of Localization. The method used in this research is Descriptive Qualitative Method to explain the efforts made by the International Committee of the Red Cross (ICRC). The data sources obtained for this research were through Literature Study, where the researcher used data from literary works, such as Journals, Books, Scientific Articles, Websites, and Official News. The results of the discussion show that there are seven types of efforts made by the International Committee of the Red Cross (ICRC), namely, Relationship Quality, Participation Revolution, Funding and Financing, Capacity, Coordination, Visibility, and Policy. From these seven efforts, the International Committee of the Red Cross (ICRC) is able to address the Humanitarian Aid Dilemma occurring in the Syrian Crisis.

Keywords: Humanitarian Aid Dilemma, International Committee of the Red Cross, Syrian Crisis , Localisation, Efforts.

Pembimbing 1

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2

Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., MA
NIP. 19930107202321102

Palembang,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Landasan Teoritis	20
2.2.1 Humanitarianisme	20
2.3 Alur Pemikiran	25
2.4 Argumentasi Utama	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Definisi Konsep	27
3.2.1 Humanitarianisme	27
3.2.2 Lokalisasi	28
3.2.2 Humanitarian Aid Dilemma	28
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Unit Analisis	31
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Keabsahan Data	33
3.8 Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH	35
4.1 <i>International Committee of the Red Cross</i>	35
4.2 <i>Krisis Kemanusiaan Suriah</i>	38
BAB V HASIL PEMBAHASAN	44
5.1 <i>Relationship Quality</i>	47
5.2 <i>Participation</i>	49
5.3 <i>Funding</i>	51
5.4 <i>Capacity</i>	56
5.5 <i>Coordination</i>	59
5.6 <i>Visibility</i>	61
5.7 <i>Policy</i>	64
BAB VI PENUTUP	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71
Daftar Pustaka	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
-------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
Tabel 2.1.....	15
Tabel 3.1.....	28

DAFTAR SINGKATAN

FSA	<i>:Free Syrian Army</i>
ICRC	<i>:International Committee of the Red Cross</i>
IFRC	<i>:International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies</i>
IDP	<i>:Internally Displaced Person</i>
IOM	<i>:International Organization for Migration</i>
IRC	<i>:International Rescue Committee</i>
MSF	<i>:Médecins Sans Frontières</i>
NGO	<i>:Non-Governmental Organization</i>
NRC	<i>:Norwegian Refugee Council</i>
UN	<i>:United Nations</i>
SARC	<i>:Syrian Arab Red Crescent</i>
UNCHR	<i>:United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF	<i>:United Nations International Children's Emergency Fund</i>
WFP	<i>:World Food Programme</i>
WHO	<i>:World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis Kemanusiaan Suriah telah berlangsung lama dan merupakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di sejarah modern. Krisis ini merupakan hasil konflik yang terjadi sejak revolusi Arab Spring pada tahun 2011 yang lalu berubah jadi konflik perang saudara di Suriah yang terus berlanjut sampai sekarang (Groizard, 2021). Aktor-aktor baik negara maupun non-negara, seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, telah bergerak dalam membantu krisis ini tapi dengan keadaan Suriah yang sedang berkonflik, maka terjadi berbagai halangan-halangan untuk komunitas internasional menjalankan bantuan kemanusiaan.

Salah satu halangan ini adalah *Humanitarian Aid Dilemma*, yang dimana para aktor-aktor kemanusiaan dibatasi gerakannya oleh pemerintahan Suriah atas dasar kekhawatiran terhadap keamanan dan kedaulatan negara sehingga para korban dari krisis ini seperti *Internal Displaced People (IDP)*, tidak dapat akses kepada bantuan kemanusiaan terutama yang berada di daerah yang dinyatakan oleh pemerintahan Suriah telah ditahankan oleh oposisi. Ini juga menimbulkan permasalahan atas keselamatan para pekerja kemanusiaan yang berada di zona konflik dan beresiko terjebak dalam baku tembak dalam berupaya membantu para korban krisis (Nurfahmi, 2017).

Krisis kemanusiaan lebih lagi diperhatikan oleh komunitas internasional ketika terjadinya gempa bumi yang melanda Suriah dan Turki pada tahun 2023. Gempa bumi Turki-Suriah memberikan pukulan yang sangat menghancurkan bagi sebuah wilayah yang

sudah berjuang dengan dampak lebih dari satu dekade perang saudara. Dengan pusat gempa yang terletak dekat perbatasan Turki-Suriah, gempa bumi tersebut mengakibatkan ribuan korban jiwa, penghancuran infrastruktur penting, dan pengungsian jutaan orang. Bagi populasi Suriah, bencana alam ini menambah kesulitan yang telah mereka alami sejak meletusnya perang saudara Suriah pada tahun 2011 (Alpert, 2023). Komunitas yang sudah rentan akibat konflik berkepanjangan mendapati diri mereka terputus dari kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis, sementara organisasi kemanusiaan terpaksa berjuang untuk mengkoordinasikan respons yang efektif. Skala bencana, ditambah dengan lanskap politik dan sosial Suriah yang terpecah, menciptakan tantangan besar untuk pengiriman bantuan.

Untuk sepenuhnya memahami sejauh mana krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah, penting untuk memahami konteks konflik Suriah dari tahun 2011 hingga 2023. Periode ini menyaksikan keruntuhan sistematis infrastruktur Suriah, pengungsian jutaan orang, dan munculnya salah satu krisis kemanusiaan yang paling kompleks dalam sejarah modern. Perang saudara meninggalkan sistem kesehatan, transportasi, dan pemerintahan negara dalam keadaan hancur, memperumit tugas tanggap bencana yang sudah sulit ketika gempa bumi melanda. Selama tahun-tahun ini, organisasi internasional berjuang untuk memberikan bantuan di tengah kekerasan dan hambatan politik, yang menjadi latar belakang penting untuk memahami kompleksitas respons terhadap gempa bumi 2023.

Krisis Suriah dimulai pada Maret 2011 dengan protes damai sebagai bagian dari *Arab Spring*, yang menginginkan reformasi politik dan menyerukan Presiden Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri. Tindakan keras pemerintah yang brutal terhadap para demonstran dengan cepat meningkat menjadi konflik bersenjata. Pada akhir tahun, pertempuran telah menyebar ke beberapa kota, tetapi krisis tersebut masih berada di tahap

awal. Sekitar 200.000 orang terpaksa mengungsi secara internal, meskipun belum ada aliran pengungsi yang signifikan. Organisasi kemanusiaan seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan *Syrian Arab Red Crescent* mulai merespons krisis yang muncul (Mirza, 2021).

Pada tahun 2012, suasinya memburuk ketika pertempuran skala besar pecah antara pasukan pemerintah dan berbagai kelompok oposisi. Kota-kota seperti Aleppo dan Homs menjadi medan pertempuran utama. Tahun ini menyaksikan pengungsian signifikan pertama dari pengungsi Suriah, dengan lebih dari 500.000 orang Suriah melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania. Jumlah *Internal Displaced People* (IDP) juga meningkat pesat, mencapai hampir 2 juta, UNHCR and *World Food Programme* (WFP) merupakan salah satu NGO yang meningkatkan operasi mereka (Salsabila, 2023).

Pada tahun 2013, krisis kemanusiaan mencapai puncaknya yang baru seiring dengan meningkatnya konflik. Lebih dari 2 juta orang Suriah menjadi pengungsi, terutama melarikan diri ke Turki, Lebanon, Yordania, dan Irak. Di dalam Suriah, jumlah IDP meningkat menjadi lebih dari 4 juta. Tanggapan kemanusiaan berkembang seiring dengan meningkatnya kehadiran organisasi non-pemerintah internasional besar seperti *Médecins Sans Frontières* (MSF) dan *Save the Children* di wilayah tersebut. Namun, akses ke daerah yang terkena dampak di dalam Suriah tetap sangat terbatas akibat konflik, yang menyulitkan pengiriman bantuan. PBB mendirikan operasi bantuan lintas batas untuk menjangkau komunitas yang terjebak. (ReliefWeb, 2013).

Krisis ini mengambil arah yang lebih gelap pada tahun 2014 dengan munculnya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang merebut wilayah yang luas di Suriah dan Irak. Ini memperkenalkan lapisan kekerasan baru, yang berkontribusi pada pengungsian lebih

lanjut. Pada akhir tahun, terdapat lebih dari 3 juta pengungsi dan 6,5 juta IDP. NGO, termasuk *International Rescue Committee* (IRC) dan *CARE international*, bekerja untuk mendukung populasi yang mengungsi, tetapi besarnya skala krisis tersebut melampaui respons internasional. Pengepungan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak menyebabkan kekurangan pangan, memperburuk situasi kemanusiaan. (Mirza, 2021).

Tahun 2015 menyaksikan eksodus massal pengungsi Suriah yang berusaha mencapai Eropa, dipicu oleh memburuknya kondisi di negara-negara yang menampung pengungsi dan meningkatnya kekerasan di dalam Suriah. Jumlah total pengungsi melebihi 4 juta, sementara 7,6 juta orang Suriah yang menjadi IDP. Krisis pengungsi menjadi titik fokus dalam politik Eropa ketika ratusan ribu orang Suriah menyeberangi Laut Mediterania. Organisasi kemanusiaan seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) mengkoordinasikan program bantuan pengungsi berskala besar, sementara *Doctors Without Borders* menyediakan perawatan medis bagi migran di jalur-jalur berbahaya.(Mirza, 2021).

Pengepungan dan jatuhnya Aleppo pada tahun 2016 menandai momen penting dalam konflik, yang mengarah pada salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam perang tersebut. Lebih dari 4,8 juta orang Suriah menjadi pengungsi pada akhir tahun, dan 6,3 juta orang menjadi IDP. Taktik pengepungan yang digunakan di Aleppo, termasuk pemblokiran makanan dan pasokan medis, menciptakan kondisi yang katastropik bagi warga sipil. NGO seperti Oxfam dan *Norwegian Refugee Council* (NRC) memberikan bantuan penting kepada mereka yang terjebak dan berada di daerah yang sulit dijangkau, tetapi situasinya tetap memprihatinkan. (UNHCR, 2024).

Pada tahun 2017, perang mulai bergeser dengan melemahnya ISIS, tetapi pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi terus berlanjut. Jumlah pengungsi mencapai 5,5 juta, dengan jumlah IDP sebanyak 6,1 juta. Akses kemanusiaan sedikit membaik di beberapa daerah, tetapi tantangan baru muncul saat ribuan orang kembali ke rumah yang hancur di daerah yang telah dibebaskan. UNICEF dan WFP memainkan peran penting dalam menyediakan makanan, air, dan pendidikan bagi anak-anak yang terlantar dan pengungsi, sementara *CARE International* fokus pada upaya pembangunan kembali di daerah yang relatif stabil (*CARE International*, 2023).

Meskipun beberapa daerah di Suriah mengalami pengurangan konflik, daerah lain masih menyaksikan kekerasan yang berlanjut, terutama di Idlib. Pada akhir tahun 2018, lebih dari 6,2 juta orang Suriah menjadi IDP, dengan 5,6 juta pengungsi masih berada di luar negeri. Sejumlah kecil pengungsi mulai kembali ke Suriah, meskipun banyak yang menghadapi kondisi yang tidak aman. Organisasi kemanusiaan seperti *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC), MSF, dan IRC bekerja untuk menyediakan tempat tinggal dan layanan kesehatan bagi para pengungsi yang kembali dan mereka yang masih terpaksa mengungsi. (Daif, 2023).

Pada tahun 2019, rezim Assad meluncurkan ofensif besar-besaran di Idlib, benteng terakhir yang dikuasai pemberontak, yang mengakibatkan pengungsian masif. Lebih dari 1 juta orang baru saja dipindahkan dalam setahun, sehingga total jumlah IDP mencapai lebih dari 6,5 juta. Sementara itu, 5,6 juta warga Suriah tetap menjadi pengungsi. PBB, WFP, dan Mercy Corps berusaha keras untuk memberikan bantuan kepada populasi yang terjebak dalam konflik yang semakin meningkat. Situasi kemanusiaan menjadi semakin kritis, dengan seluruh komunitas terputus dari bantuan akibat permusuhan (Alhousseiny, 2021).

Pandemi COVID-19 global menambah dimensi baru pada krisis di tahun 2020. Pandemi mengancam sistem kesehatan yang rapuh di Suriah, dimana bertahun-tahun konflik telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur kesehatan. Pengungsi dan penyintas dalam situasi darurat sangat rentan, dengan kamp yang padat dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Pada akhir tahun 2020, 6,7 juta warga Suriah menjadi IDP dan 5,5 juta menjadi pengungsi. Organisasi internasional seperti *World Health Organisation* (WHO) dan MSF fokus pada pencegahan penyebaran COVID-19 di kamp dan zona konflik, sementara NGO lainnya melanjutkan upaya mereka untuk menyediakan makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. (Douedari, 2023).

Perang di Suriah memasuki tahun ke-10 pada tahun 2021, tanpa ada resolusi politik yang terlihat. Pada saat ini, jumlah total IDP telah mencapai 6,7 juta, sementara 5,6 juta orang Suriah tetap menjadi pengungsi. Meskipun pertempuran berskala besar telah mereda di banyak daerah, kekerasan lokal masih terus berlangsung. UNHCR, IRC, dan organisasi kemanusiaan lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari populasi yang terpaksa mengungsi di tengah menurunnya pendanaan internasional. Kejatuhan ekonomi di Suriah dan negara-negara tetangga yang menampung pengungsi memperburuk krisis kemanusiaan, meninggalkan banyak orang tanpa akses ke kebutuhan dasar (Douedari, 2023).

Pada tahun 2022, ekonomi Suriah terus memburuk, dipicu oleh dampak jangka panjang dari perang, sanksi internasional, dan COVID-19. Rakyat Suriah menghadapi kemiskinan yang meluas, dengan 5,5 juta pengungsi dan 6,9 juta IDP. Organisasi kemanusiaan, termasuk UNICEF, Oxfam, dan WFP, menghadapi kekurangan dana, yang membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan makanan, pendidikan, dan layanan

kesehatan bagi populasi yang terdampak. Sementara itu, konvoi bantuan menghadapi tantangan untuk mencapai daerah yang dikuasai oposisi (UNHCR, 2024).

Pada tahun 2023, situasi semakin memburuk setelah gempa bumi yang menghancurkan melanda barat laut Suriah dan Turki pada bulan Februari. Bencana tersebut memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah kritis, mengungsi lebih banyak orang dan mengganggu upaya bantuan. Jumlah total IDP meningkat menjadi lebih dari 7 juta, sementara 5,4 juta pengungsi masih berada di luar negeri. Organisasi kemanusiaan, termasuk UNHCR, WHO, dan Palang Merah, meningkatkan operasi mereka untuk memberikan bantuan darurat, tempat tinggal, dan perawatan medis kepada para penyintas gempa bumi. Namun, dampak gabungan dari konflik yang terus berlanjut, keruntuhan ekonomi, dan gempa bumi telah meninggalkan jutaan orang dalam kebutuhan mendesak akan bantuan (Alpert, 2023).

Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi, Internal Displaced People, dan NGO di Suriah tahun 2011-2023

Tahun	Jumlah Pengungsi dan IDP	Jumlah NGO yang terlibat	Keterangan
2011	200.000 IDP	2	Mulai protes damai dari Gerakan <i>Arab Spring</i>
2012	500.000 Pengungsi dan 6.500.000 IDP	4	Mulainya Perang Sipil Suriah dan terjadinya pertempuran di Kota Aleppo dan Homs
2013	2.000.000 Pengungsi dan 7.600.000 IDP	7	Konflik di Suriah mulai memburuk dan akses terhadap bantuan luar negeri untuk para korban konflik

			mulai dibatasi
2014	3.000.000 pengungsi dan 6.500.000 IDP	9	Muncul Islamic State of Iraq and Syria dalam Konflik Suriah
2015	4.000.000 Pengungsi 7.600.000 IDP	12	Terjadinya pengungsian massal ke Eropa melalui Laut Mediterania
2016	4.850.000 Pengungsi dan 6.300.000 IDP	15	Pengepungan dan jatuhnya Kota Aleppo
2017	5.500.000 Pengungsi dan 6.100.000 IDP	18	Kekuatan ISIS mulai melemah di Suriah dan ribuan penduduk Suriah kembali ke pada rumah mereka dalam keadaan hancur
2018	5.600.000 pengungsi dan 6.200.000 IDP	21	Meningkatnya kekerasan dari konflik terutama di Kota Idlib
2019	5.600.000 Pengungsi dan 6.500.000 IDP	24	Rezim Presiden Bashar Al-Assad meluncurkan penyerangan di Kota Idlib
2020	5.500.000 Pengungsi dan 6.700.000 IDP	27	Mulainya pandemi COVID-19 yang mengancam sistem kesehatan Suriah yang sudah rapuh
2021	5.600.000 Pengungsi dan 6.700.000 IDP	30	Kekerasan dari Konflik Suriah terus meningkat dan akses terhadap bantuan luar negeri tambah

			diketakan
2022	5.500.000 pengungsi dan 6.9000.000 IDP	33	Perekonomian Suriah menurun dan organisasi kemanusiaan terus dihadang ke daerah-daerah penduduk yang menbutuhkan
2023	5.400.000 Pengungsi dan 7.000.000 IDP	36	Terjadinya gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah

(<https://www.statista.com/statistics/740245/number-of-internally-displaced-persons-in-syria/>)

Setelah 12 tahun konflik setidaknya 5,4 Juta penduduk melarikan diri dari Suriah dan 7 juta orang di dalam Suriah tidak dapat mengakses atau membeli makanan yang cukup berkualitas (UNHCR, 2024). Kerusakan infrastruktur telah berdampak besar pada akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Keruntuhan ekonomi, diperparah dengan sanksi internasional, semakin memperparah penderitaan penduduk Suriah.

International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan organisasi internasional yang berdiri sejak tahun 1863 dan berpusat di Swiss dengan beranggotakan Palang Merah Nasional masing-masing negara anggota. Dengan mandat ICRC yang berbunyi: “*We take action to assist the victims of armed conflict and other violence, and at the same time promote respect for international humanitarian law and its implementation in domestic law*” (ICRC, 2023), ICRC menjadi salah satu organisasi kemanusiaan yang memainkan peran dalam memberikan bantuan kemanusiaan di zona konflik di seluruh dunia berdasarkan hukum kemanusiaan internasional maupun hukum domestik. Sejak dari tahun 2011, upaya ICRC di Suriah berfokus pada penyediaan layanan medis darurat,

mendukung fasilitas kesehatan, memastikan akses air bersih, dan menyatukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah akibat konflik (Nurfahmi, 2017).

ICRC dan organisasi internasional kemanusiaan lainnya telah berada di garis depan upaya untuk meringankan penderitaan di Suriah. Namun, organisasi-organisasi ini telah menghadapi hambatan besar dalam pekerjaan kemanusiaan mereka, terutama setelah gempa bumi. Salah satu tantangan utama adalah mendapatkan akses ke daerah-daerah yang terkena dampak, banyak di antaranya dikendalikan oleh berbagai faksi yang terlibat dalam konflik Suriah (Nurfahmi, 2017). ICRC dan NGO lainnya telah menemukan kesulitan dalam menavigasi lingkungan politik yang terfragmentasi, yang dipenuhi dengan risiko keamanan dan tantangan logistik. Penghancuran infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, dan jaringan komunikasi, semakin menghambat kemampuan mereka untuk memberikan bantuan tepat waktu. Selain itu, banyak NGO yang beroperasi dengan dana terbatas, dan seiring dengan berlanjutnya krisis, kelelahan donor mulai muncul, yang mengakibatkan kekurangan sumber daya penting yang diperlukan untuk mempertahankan operasi kemanusiaan jangka panjang (ReliefWeb, 2023).

Selain kesulitan logistik dan finansial, keberadaan zona konflik yang aktif juga telah menimbulkan ancaman signifikan terhadap keselamatan pekerja kemanusiaan. Telah terjadi banyak kasus di mana konvoi bantuan tertunda atau diserang, membuatnya berbahaya bagi organisasi seperti ICRC untuk melaksanakan tugas mereka. Pekerja kemanusiaan sering terjebak dalam baku tembak antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi, meningkatkan risiko bagi mereka yang berusaha memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Faktor-faktor ini telah sangat menghambat kemampuan NGO untuk merespons gempa bumi secara efektif, meskipun ada kebutuhan mendesak akan bantuan (Daif, 2023).

Menambah kesulitan yang dihadapi oleh organisasi internasional adalah pendekatan pemerintah Suriah terhadap operasi NGO, terutama kekhawatirannya mengenai keamanan nasional. Pemerintah Suriah, yang waspada terhadap campur tangan asing dan potensi bahwa bantuan dapat menguntungkan kelompok oposisi, telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap kegiatan NGO. Pembatasan ini mencakup penundaan birokrasi dalam memberikan akses ke wilayah tertentu, pemantauan ketat terhadap distribusi bantuan, dan penolakan masuk secara langsung ke daerah konflik yang berada di bawah kendali oposisi. Sikap resmi pemerintah berakar pada kekhawatiran bahwa NGO asing dapat secara tidak sengaja membantu kekuatan pemberontak atau mengkompromikan area sensitif dengan memberikan akses ke wilayah yang dianggap strategis dalam perang yang sedang berlangsung. Akibatnya, pemerintah telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses kemanusiaan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, meninggalkan banyak warga sipil dalam situasi yang rentan, terputus dari bantuan yang sangat penting (ReliefWeb, 2023).

Kekhawatiran keamanan ini telah mengarah pada situasi di mana pengiriman bantuan dipolitisasi, dengan NGO perlu bernegosiasi dengan hati-hati antara berbagai faksi untuk memastikan akses mereka tidak sepenuhnya terhalang. Kekuasaan pemerintah Suriah yang bersikeras untuk mengendalikan ketat organisasi bantuan internasional telah menunda dan, dalam beberapa kasus, mencegah bantuan mencapai mereka yang paling terdampak oleh gempa bumi. Selain itu, sifat konflik yang terfragmentasi berarti bahwa di beberapa daerah, aktor lokal harus memimpin dalam distribusi bantuan. Ini semakin mempersulit proses bagi NGO internasional, yang harus menyeimbangkan tuntutan pemerintah Suriah dengan realitas di lapangan dan kebutuhan mendesak untuk berkolaborasi dengan aktor lokal.

Tantangan yang terus berlanjut dalam memberikan bantuan kemanusiaan selama krisis Suriah dari 2011 hingga 2023 telah menunjukkan keterbatasan pendekatan internasional yang terpusat. Upaya-upaya ini, meskipun berniat baik, sering kali gagal untuk secara memadai menangani konteks lokal, nuansa budaya, dan kebutuhan mendesak dari komunitas yang terdampak. Kegagalan ini menyoroti perlunya pergeseran menuju lokalisasi, di mana aktor lokal memimpin dan organisasi internasional mendukung, memastikan bahwa bantuan lebih terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan budaya.

Selain itu, gempa bumi Turki-Suriah 2023 telah meningkatkan urgensi untuk penelitian mengenai strategi lokalisasi. Gempa bumi memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah parah, mengungkapkan ketidakcukupan yang mencolok dalam mekanisme bantuan yang sudah tertekan akibat lebih dari satu dekade konflik. Saat organisasi bantuan berusaha merespons, peran aktor lokal menjadi semakin jelas, menekankan kebutuhan mendesak untuk pemberdayaan, pengembangan kapasitas, dan distribusi sumber daya yang lebih baik di tingkat lokal.

Mengingat frekuensi dan kompleksitas krisis kemanusiaan yang semakin meningkat, terutama di daerah yang terkena konflik seperti Suriah, menjadi mendesak untuk mengeksplorasi bagaimana organisasi internasional seperti ICRC dapat menyesuaikan strategi kemanusiaan mereka untuk memastikan pengiriman bantuan yang lebih efektif. Krisis Suriah tahun 2023 menghadirkan tantangan unik di mana hambatan politik, logistik, dan sosial memperumit upaya kemanusiaan internasional. Seiring krisis global meningkat dalam skala dan intensitas, memahami bagaimana organisasi seperti ICRC dapat mengatasi hambatan ini sangat penting. Penelitian ini sangat penting dalam menangani dilema kemanusiaan yang sedang berlangsung, menawarkan wawasan yang dapat membentuk respons kemanusiaan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam krisis

mendatang, di mana kerja sama internasional dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk mengurangi penderitaan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana upaya lokalisasi *International Committee of the Red Cross* menghadapi *Humanitarian Aid Dilemma* pada Krisis Suriah tahun 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis upaya-upaya lokalisasi dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross* menghadapi *Humanitarian Aid Dilemma* pada Krisis Suriah tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang dilema bantuan kemanusiaan, khususnya dalam konteks konflik bersenjata. Dengan memfokuskan pada kasus Suriah, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana organisasi internasional seperti ICRC beradaptasi dan bereaksi terhadap tantangan operasional yang dihadapi dalam situasi krisis.
- b) Penelitian ini juga berkontribusi perdebatan tentang konsep lokalisasi dalam konteks bantuan kemanusiaan. Dengan menganalisis bagaimana ICRC bekerja sama dengan aktor lokal di Suriah, penelitian ini menambah wawasan tentang efektivitas strategi lokalisasi dalam memperkuat respon kemanusiaan di wilayah konflik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat digunakan oleh ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk meningkatkan efektivitas operasional mereka di wilayah konflik. Dengan memahami tantangan dan keberhasilan yang dialami di Suriah, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menangani situasi serupa di masa depan.
- b) Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam implementasi lokalisasi. Hal ini penting bagi organisasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta meningkatkan keterlibatan aktor lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Abu-Ras, W., Ashraf AbuLaban, A., Talat AlQaisi, S., AlQaisi, M. T. H., & Decker, E. (2023). Orphans in Syria and Iraq Juggling Balls: Wars, COVID-19, and the NGO's financial crisis. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2170010>
- Alhousseiny, M., & Atar, E. M. R. A. H. (2021). The evolution of the Syrian humanitarian NGOs and external challenges. *The Rest: Journal of politics and development*, 11(2).
- Alkhailil, M., Ekzayez, A., Rayes, D., & Abbara, A. (2023). Inequitable access to aid after the devastating earthquake in Syria. *The Lancet. Global Health*, 11(5), e653–e654. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(23\)00132-8](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(23)00132-8)
- Alpert, Rachel. Bernstein, Alyssa. (2023, Maret 16). *Breaking Down Barriers to Emergency Earthquake Aid in Syria. Just Security*. <https://www.justsecurity.org/85499/breaking-down-barriers-to-emergency-earthquake-aid-in-syria/>
- Ekzayez, Abdulkarim. (2020). Partnerships with local organisations are vital for conducting health research in Syria—personal reflections. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00079-z>
- Cahill, K. M. (Ed.). (2013). History & hope: International humanitarian reader. Fordham University Press.
- Carboni, F. (2023). ICRC Middle East regional director's statement on localisation and earthquake response in Syria.
- Daif, A., Glazik, R., Checchi, F., & Khan, P. (2023). The effect of internal displacement due to armed conflict on tuberculosis treatment outcomes in northwest Syria, 2019- 2020. <https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4670521/>
- Douedari, Y., Alhaffar, M., Khanshor, A., Alrashid Alhiraki, O., Marzouk, M., & Howard, N. (2023). “COVID-19 is just another way to die...”: a qualitative longitudinal study of frontline COVID-19 response governance across Syria. <https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4671658/>
- Global Mentoring Initiative. (2018). Humanitarian action principles - Politics. Global Mentoring Initiative.

Groizard, J. L., Mohanad Ismael, & Santana-Gallego, M. (2021). Political Upheavals, Tourism Flight, and Spillovers: The Case of the Arab Spring. <https://doi.org/10.25384/sage.c.5418644>

Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.

Hilhorst, D. (2018). Classical humanitarianism and resilience humanitarianism: Making sense of two brands of humanitarian action. International Journal of Humanitarian Action, 3(1), 15.

Humanitarian Affairs Research Brief. (2023). Evaluating localisation strategies in Syria.

Indrawan WS (2010). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media.

International Committee of the Red Cross. (2023). ICRC response to the February 2023 earthquakes in Syria. <https://www.icrc.org/en/document/syria-earthquake-response-2023>

International Committee of the Red Cross. (2023). Facts and figures: January to June 2023 – Syria operations. <https://www.icrc.org/en/document/facts-figures-syria-2023>

International Committee of the Red Cross. (2023). Syria: Helping communities affected by conflict and disasters. <https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/syria>

ICRC. *Our mandate and mission*. (2023, December 17). International Committee of the Red Cross. <https://www.icrc.org/en/our-mandate-and-mission>

UNHCR. (2024, Maret 13) *Syria Refugee Crisis Explained*. <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/>

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145-151.

Massari, A. (2021). Humanitarian NGOs and Global Governance: One, No One and One Hundred Thousand Humanitarian NGOs. In *Visual Securitization: Humanitarian Representations and Migration Governance*. Cham: Springer International Publishing. 73-101. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71143-6_4

Meininghaus, Esther; Kühn, Michael (2018) *SYRIA: HUMANITARIAN ACCESS DILEMMAS*.

Meyer, Y., & Richardson Jané, P. (2021). Upholding the Humanitarian Principles in Conflict Areas–Challenges and Compromises: The Cases of Syria and Afghanistan.

Mirza, M. N., Abbas, H., & Qaisrani, I. H. (2021). Anatomising Syrian crisis: Enumerating actors, motivations, and their strategies (2011-2019). Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ); Vol. 5 No. 1 (2021): January-June 2021; 41-54 ; 2664-8148. <https://www.ideapublishers.org/index.php/lassij/article/view/275>

Nasir, N., & Sukmawati, S. (2023). Analysis of Research Data Quantitative and Qualitative. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 7(1), 368-373.

Number of internally displaced persons in Syria 2012-2022. (2024). Statista. <https://www.statista.com/statistics/740245/number-of-internally-displaced-persons-in-syria/>

Nurfahmi, E. (Eko). (2017). Keterbatasan International Committee Of The Red Cros (ICRC) dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Suriah. Journal of International and Local Studies. <https://www.neliti.com/publications/339332/keterbatasan-international-committee-of-the-red-cros-icrc-dalam-mengatasi-krisis>

Northwest Syria: Escalation of violence displaces over 20,000 people. (2023). CARE International. <https://www.care-international.org/news/northwest-syria-escalation-violence-displaces-over-20000-people>

Peter Salim, Y. S. (2002). Kamus bahasa Indonesia kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

Rana B. Khoury, Emily K.M. Scott (2024). *Going local without localization: Power and humanitarian response in the Syrian war*. World Development, Vol 174. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106460>.

Rajaram, P. K. (2002). Humanitarianism and representations of the refugee. *Journal of Refugee Studies*, 15(3), 247–264. <https://doi.org/10.1093/jrs/15.3.247>.

ReliefWeb. Syria humanitarian needs overview. (2013, 26 April) <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-humanitarian-needs-overview-26-april-2013>

ReliefWeb. *Plagued by 12 years of conflict, Syria's suffering only compounded by Earthquake, officials tell security council, citing hampered emergency response*. UN Security Council (2023, Maret 11). <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/plagued-12-years-conflict-syrias-suffering-only-compounded-earthquake-officials-tell-security-council-citing-hampered-emergency-response>

Roborgh, Sophia (2021) *Localisation in the balance – Syrian medical-humanitarian NGOs' strategic engagement with the local and international*. *Disasters*. Vol 47 No 2; 519-542 <https://doi.org/10.1111/dis.12504>.

Syrian Arab Red Crescent. (2023). Partnerships and field operations in Syria.

Salsabila, A. K., & Aswar, H. (2023). Analisis Peran Medecins Sans Frontieres Terhadap Krisis Kemanusiaan Di Suriah Melalui Pendekatan Prinsip Kemanusiaan. Hasanuddin Journal of International Affairs; Vol. 3 No. 2 (2023); 111 - 122 ; 2775-3336 ; 2774-7328 ; 10.31947/Hjirs.V3i2.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/27482>

Van Brabant, K., & Patel, S. (2018). *Localisation in practice: Emerging indicators for localisation*. Global Mentoring Initiative.

Wieland, Carsten (2021). *SYRIA AND THE NEUTRALITY TRAP: Dilemmas of Delivering Humanitarian Aid through Violent Regimes*. I.B. TAURIS.